

KEPEMIMPINAN DAN MORALITAS DALAM KONTEKS BUDAYA: PERBANDINGAN ANTARA 'THE PURCHASE OF SLAVES' KARYA KAI KAUS DAN 'ADVICE TO GOVERNORS' OLEH NIZAM AL-MULK

Nameera Shafwatul Mutmainnah¹, Putri Nadia Rahman², Sania Umul Quro³, Nurholis⁴
^{1,2,3,4}Jurusan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: July 2025

Available online

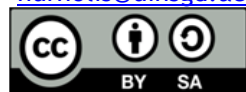
Korespondensi: Email:

¹nameerashafwa@gmail.com

²putrinadia04092004@gmail.com

³[saniauacan@gmail.com](mailto:saniaucan@gmail.com)

⁴nurholis@uinsgd.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRACT

*This article discusses the comparative thinking on leadership and morality in two classic works from the 11th century Islamic civilization, namely *The Purchase of Slaves* by Kai Kaus and *Advice to Governors* by Nizam Al-Mulk. The purpose of this paper is to see how the two figures interpret the role of a leader and the moral values that must be possessed, based on their respective cultural and social backgrounds. This study uses a qualitative method with a library research approach. The results of the analysis show that Kai Kaus emphasizes leadership in the personal and aristocratic sphere with a humanist social ethics approach, while Nizam Al-Mulk emphasizes the importance of justice and divine responsibility in a formal government system. This comparison shows that despite their different approaches, both place morality as an important element in ideal leadership.*

Keywords: Leadership, Morality, Kai Kaus, Nizam Al-Mulk

ABSTRACT

Artikel ini membahas perbandingan pemikiran tentang kepemimpinan dan moralitas dalam dua karya klasik dari peradaban Islam abad ke-11, yaitu *The Purchase of Slaves* karya Kai Kaus dan *Advice to Governors* karya Nizam Al-Mulk. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana kedua tokoh tersebut memaknai peran seorang pemimpin serta nilai-nilai moral yang harus dimiliki, berdasarkan latar budaya dan sosial mereka masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kai Kaus menekankan kepemimpinan dalam lingkup pribadi dan aristokratik dengan pendekatan etika sosial yang humanis, sementara Nizam Al-Mulk lebih menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab ilahiah dalam sistem pemerintahan yang formal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda pendekatan, keduanya sama-sama menempatkan moralitas sebagai unsur penting dalam kepemimpinan yang ideal.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Moralitas, Kai Kaus, Nizam Al-Mulk

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dan moralitas adalah dua aspek utama yang membentuk fondasi peradaban manusia. Keduanya tidak hanya menentukan arah kebijakan dan keputusan seorang penguasa, tetapi juga menjadi cermin bagi nilai-nilai budaya dan spiritual yang hidup dalam masyarakatnya. Dalam sejarah peradaban Islam dan Persia, dua karya besar yang menggambarkan gagasan kepemimpinan dan moralitas adalah *Qabus Nama* karya Kai Kaus dan *Siyasatnama (Advice to Governors)* karya Nizam Al-Mulk. Meskipun lahir dari latar sosial dan politik yang berbeda, kedua karya ini tetap relevan untuk dianalisis sebagai warisan pemikiran klasik yang sarat makna.

Kai Kaus menulis *Qabus Nama* pada abad ke-11 sebagai bentuk nasihat untuk anaknya, Gilanshah. Salah satu bagian penting dalam karya ini berjudul *The Purchase of Slaves*, di mana ia tidak hanya memberi panduan praktis memilih budak, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai moral tentang memperlakukan mereka secara manusiawi. Dalam salah satu bagian, ia menulis “*And be not overbearing or oppressive towards your slaves, for they too are human beings... treat them kindly, for harshness will breed rebellion, while kindness brings loyalty*” (Ka’us, 1951). Pernyataan ini menunjukkan bahwa, bahkan dalam konteks sosial yang mengenal perbudakan, terdapat upaya membangun relasi kekuasaan yang tetap menjunjung nilai keadilan dan empati.

Sementara itu, *Siyasatnama* karya Nizam Al-Mulk ditulis juga pada abad ke-11, namun berangkat dari pengalaman langsung sang penulis sebagai wazir dalam struktur pemerintahan Kesultanan Seljuk. Dalam bab tentang penguasa dan keadilan, Nizam dengan tegas menulis “*A ruler should always keep before his eyes the fear of God and the Day of Judgment... justice is the foundation of kingship*” (Al-Mulk, 1960). Bagi Nizam, kekuasaan tidak boleh dijalankan semata demi stabilitas politik, melainkan harus dilandasi oleh tanggung jawab moral dan ketundukan kepada hukum ilahi.

Dengan mempertimbangkan latar budaya dan tujuan penulisan yang berbeda, artikel ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Kai Kaus dan Nizam Al-Mulk dalam hal kepemimpinan dan moralitas. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana dua intelektual dari peradaban Islam klasik tersebut merumuskan etika kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan pengalaman sosial mereka.

LITERARY REVIEW

Penelitian mengenai pemikiran politik dan etika kepemimpinan Nizam Al-Mulk telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti relevansi pemikiran dalam *Siyasatnama* terhadap konteks pemerintahan Islam klasik. Dalam jurnal *Islamika*, Nizam Al-Mulk digambarkan sebagai pemikir praktisi yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik administrasi kerajaan. Ia menekankan pentingnya *sharī’ah* dan keadilan sebagai fondasi negara, serta peran moralitas dalam menjaga stabilitas dan legitimasi kekuasaan (Fuad, 2018). Sementara itu, artikel dalam *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* menambahkan bahwa Nizam Al-Mulk tidak hanya mengedepankan aspek etika dan hukum dalam pemerintahan, tetapi juga memperkenalkan sistem politik yang terstruktur, termasuk pengawasan terhadap pejabat, *reward and punishment*, serta keharusan bagi raja untuk tetap dekat dengan rakyat melalui musyawarah dan konsultasi (Pratama & Hidayatullah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ideal menurut Nizam Al-Mulk bukan hanya bersifat *top down*, melainkan harus responsif terhadap kondisi sosial budaya masyarakatnya.



Dalam jurnal *Analisis Advice to Government Karya Nizam Al-Mulk*, penulis menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan dalam *Siyasatnama* bersifat universal namun tetap berakar kuat pada budaya Persia Islam. Menariknya, jurnal ini juga mengangkat perbandingan dengan Kai Kaus, dimana disebutkan bahwa meskipun *Qabus Nama* bersifat lebih aristokratik dan privat, namun tetap menempatkan aspek moralitas dalam relasi kuasa. Kai Kaus dinilai memberi perhatian pada etika interpersonal, termasuk bagaimana memperlakukan budak secara manusiawi dan bijak sebagai bagian dari tanggung jawab pemimpin (Aziera, 2020).

Ketiga jurnal tersebut mengindikasikan bahwa pemikiran Nizam Al-Mulk tentang kepemimpinan dan moralitas memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan teori negara dan pemerintahan Islam klasik. Temuan-temuan ini memberikan dasar teoretis yang kuat untuk membandingkan dengan karya *The Purchase of Slaves* oleh Kai Kaus, yang juga mengandung nilai-nilai moral dan prinsip kepemimpinan dalam bingkai budaya Persia.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isi dua karya klasik, yaitu *The Purchase of Slaves* dalam *Qabus Nama* karya Kai Kaus dan *Advice to Governors* dalam *Siyasatnama* karya Nizam Al-Mulk. Metode ini cocok karena fokus penelitian ini adalah pada isi dan pesan moral dari teks, bukan data lapangan.

Sumber data berasal dari buku-buku dan jurnal yang sudah ditulis sebelumnya, baik yang asli maupun yang sudah diterjemahkan. Data dianalisis secara deskriptif, yaitu dijelaskan isi dan maknanya, lalu dibandingkan antara keduanya. Fokus utama perbandingan ada pada bagaimana kedua penulis memahami kepemimpinan dan moralitas, serta sejauh mana budaya tempat mereka hidup memengaruhi pandangan mereka.

RESULT AND DISCUSS

Dalam membedah persoalan kepemimpinan dan moralitas dalam konteks budaya, penting untuk memahami bahwa setiap teks tidak lahir dalam ruang hampa. Ia muncul dari latar sosial, politik, dan kultural tertentu yang membentuk cara pandang penulis terhadap kekuasaan dan nilai-nilai kehidupan. Baik *The Qabus Nama* karya Kai Kaus maupun *Siyasatnama* karya Nizam Al-Mulk merupakan cermin dari pergulatan intelektual dan moral pada abad ke-11 M di dunia Islam, khususnya Persia. Keduanya mengusung gagasan tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap dan bertindak, namun dengan pendekatan dan nuansa yang berbeda. Pembahasan ini diawali dengan pengenalan terhadap kedua teks tersebut sebagai dasar untuk memahami perspektif masing-masing penulis, sebelum kemudian menganalisis bagaimana nilai-nilai kepemimpinan dan moralitas dibangun, ditanamkan, serta dijalankan dalam konteks budaya yang melingkupinya.

Gambaran Umum Karya

1. *The Purchase of Slaves* Karya Kai Kaus (*Qabus Nama*)

Qabus Nama adalah karya sastra dan etika dari abad ke-11 yang ditulis oleh Kai Kaus ibn Iskandar, seorang pangeran dari dinasti Ziyarid (Ka'us, 1951). Ditulis dalam bentuk surat nasihat kepada anaknya, Gilanshah, karya ini mengandung 44 bab yang membahas berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata cara bersosialisasi, strategi karier, etika sosial, hingga hal-hal praktis seperti berdagang dan memilih budak. Salah satu bab yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah bab ke-23: *The Purchase of Slaves*. Dalam bab tersebut, Kai Kaus memberikan nasihat yang bukan hanya bersifat teknis tetapi juga etis: bagaimana seorang bangsawan memilih budak yang tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga cerdas, patuh, dan bermoral baik.



Meskipun konteks sosialnya berasal dari masyarakat hierarkis dan aristokratik, pendekatan Kai Kaus mengandung nilai-nilai pragmatis dan sedikit sentuhan humanistik. Ia mengingatkan bahwa seorang pemilik budak harus memperhatikan watak dan kesejahteraan budaknya, karena hubungan antara tuan dan budak akan memengaruhi kehormatan serta stabilitas rumah tangga bangsawan.

Gaya penulisannya bersifat personal, reflektif, dan penuh perumpamaan. Kai Kaus tidak berbicara atas nama negara atau institusi, tetapi sebagai ayah dan aristokrat yang ingin membentuk karakter anaknya dalam menghadapi dunia yang penuh intrik dan ketidakpastian. Oleh karena itu, moralitas dalam karya ini lebih bersifat fungsional dan kontekstual suatu pendekatan khas dalam budaya Persia pasca Islamisasi yang masih menyimpan nuansa Zoroastrian dan aristokrasi pra Islam.

2. *Advice to Governors* Karya Nizam Al-Mulk (*Siyasatnama*)

Berbeda dengan Qabus Nama yang bernuansa personal dan privat, *Siyasatnama* adalah karya yang lahir dari jantung kekuasaan imperium. Ditulis oleh Nizam al-Mulk, wazir besar Kesultanan Saljuk pada masa Alp Arslan dan Malikshah, karya ini merupakan manifestasi dari pengalaman administratif, visi politik, dan pandangan teologis yang integratif (Al-Mulk, 1960). Ia memimpin selama hampir 30 tahun dan dianggap sebagai salah satu arsitek negara Islam klasik paling berhasil di abad pertengahan.

Dalam *Advice to Governors* (salah satu bab dalam *Siyasatnama*), Nizam menekankan pentingnya keadilan, integritas, dan tanggung jawab moral sebagai landasan utama bagi siapa pun yang diberikan wewenang untuk memerintah. Nasihat tersebut mencerminkan pandangannya bahwa kekuasaan adalah amanat ilahi yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan. Hal ini diperkuat dengan kutipan terkenal dari (Fuad, 2018) “Setiap orang yang memerintah atas hamba-hamba Allah di dunia akan dibawa dengan tangan terikat pada Hari Pembalasan. Jika dia berlaku adil, keadilannya mengendurkan tangannya dan dia masuk surga. Jika dia berbuat zalim, dia akan dilemparkan ke Neraka dengan tangan terikat.”

Siyasatnama adalah produk dari pengalaman praktis Nizam sebagai negarawan sekaligus pemikir. Ia tidak hanya menulis teori pemerintahan yang abstrak, melainkan merumuskan prinsip-prinsip birokrasi yang telah ia terapkan sendiri: mulai dari struktur kementerian, posisi wazir dan qadhi, pentingnya lembaga intelijen, hingga pengelolaan pajak dan keadilan sosial (Fuad, 2018). Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh doktrin Asy’ariyah dan madzhab Syafi’i, tetapi juga diperkaya oleh warisan politik Persia kuno.

Dengan gaya penulisan yang lugas dan kadang bernuansa naratif-historis, *Siyasatnama* menjadi panduan praktis yang tidak hanya mengatur aspek administratif pemerintahan, tetapi juga mengajarkan pentingnya moralitas, musyawarah, dan kesalehan pribadi seorang pemimpin.

Kedua karya ini merefleksikan pandangan-pandangan yang berkembang dalam konteks Persia Islam abad ke-11, tetapi dari spektrum yang berbeda. *Qabus Nama* bersifat edukatif pribadi dan berorientasi pada pembentukan karakter pemimpin dalam lingkungan aristokrasi lokal, sementara *Siyasatnama* bersifat institusional dan ortodoks, ditujukan bagi para pemimpin negara sebagai panduan strategis dan spiritual. Kai Kaus mengajarkan kepemimpinan melalui cara memilih, mendidik, dan bersikap terhadap orang-orang yang dikuasai, dengan moralitas sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan harmoni sosial. Sebaliknya, Nizam Al-Mulk membingkai kepemimpinan sebagai mandat ilahi, dimana moralitas adalah prinsip utama yang menopang legitimasi kekuasaan dan keberlangsungan negara.

Konsep Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan dalam kedua karya yang dikaji menunjukkan perbedaan fundamental dalam pendekatan, sumber legitimasi, dan cakupan kekuasaannya. Perbedaan ini muncul dari latar belakang sosial-politik dan posisi penulis masing-masing.

1. Kai Kaus: Kepemimpinan dalam Ruang Privat dan Aristokratik

Dalam *Qabus Nama*, khususnya bab *The Purchase of Slaves*, kepemimpinan dipahami dalam konteks hubungan interpersonal dan tanggung jawab seorang bangsawan terhadap lingkungannya. Kai Kaus memandang kepemimpinan bukan sebagai jabatan formal, melainkan sebagai seni sosial dan etika aristokratik. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu mengenali karakter orang lain, memperlakukan mereka dengan adil, dan menghindari tindakan semena-mena. Dalam memberi nasihat kepada anaknya, ia menulis: "*When you buy a slave, buy him not solely for his strength or youth, but for his reason and good manners.*" (Ka'us, 1951)

Kai Kaus menggarisbawahi pentingnya pemilihan orang-orang kepercayaan, termasuk budak, sebagai cerminan kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola manusia. Kepemimpinan di sini adalah bentuk dari kecakapan sosial, keterampilan membaca tabiat orang, dan kemampuan menjalin relasi yang fungsional. Penekanan pada pragmatisme, keluwesan, dan kecerdikan memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam *Qabus Nama* lebih menekankan etika pragmatik ketimbang prinsip moral yang idealistik.

2. Nizam Al-Mulk: Kepemimpinan sebagai Amanah Ilahi dan Struktur Kekuasaan

Dalam *Siyasatnama*, kepemimpinan merupakan jabatan formal yang disahkan secara religius dan harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan umat. Nizam Al-Mulk melihat seorang pemimpin, baik itu sultan maupun gubernur, sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Dalam bab *Advice to Governors*, ia menegaskan: "*The king must act with justice, for the king is the shadow of God upon earth.*" (Al-Mulk, 1960)

Nizam mengaitkan kekuasaan dengan nilai-nilai *sharī'ah* dan prinsip keadilan (*`adl*), serta menekankan bahwa penyalahgunaan kekuasaan akan berujung pada kehancuran moral dan politik. Ia juga menggambarkan struktur kepemimpinan yang kompleks dan hirarkis, lengkap dengan lembaga *wazīr*, *qādī*, mata-mata (intelijen), dan aparat perpajakan, semua diikat oleh prinsip tanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat. Gagasan kepemimpinan Nizam Al-Mulk tidak semata-mata didasarkan pada pengalaman birokratis, tetapi juga diinspirasi oleh tradisi politik Persia kuno dan pemikiran teologi Islam. (Fuad, 2018)

Perbandingan antara dua tokoh ini menunjukkan dua paradigma kepemimpinan:

Aspek	Kai Kaus (<i>Qabus Nama</i>)	Nizam Al-Mulk (<i>Siyasatnama</i>)
Sumber Legitimasi	Status sosial dan pengalaman personal	Amanat Tuhan dan syariat Islam
Fokus Kepemimpinan	Interaksi personal, kontrol sosial	Struktur pemerintahan, keadilan sosial
Tujuan	Keseimbangan sosial dan kehormatan pribadi	Stabilitas negara dan keadilan publik
Gaya Penulisan	Naratif-pribadi dan Reflektif	Normatif dan sistematis



Moralitas Dalam Konteks Sosial

Moralitas merupakan fondasi yang tidak bisa dipisahkan dari konsep kepemimpinan dalam kedua karya yang dikaji. Namun, pendekatan masing-masing tokoh terhadap moralitas menunjukkan perbedaan mendasar dalam orientasi, kedalaman nilai, dan tujuan akhirnya.

1. Kai Kaus: Moralitas sebagai Instrumen Kehormatan dan Kehidupan Sosial

Dalam *Qabus Nama*, moralitas dibingkai dalam kerangka etika sosial yang kontekstual. Kai Kaus memberikan nasihat yang bersifat situasional yakni bagaimana seseorang bertindak dengan bijak dalam posisi berkuasa, termasuk dalam memperlakukan orang-orang di bawahnya, seperti budak (Ka'us, 1951). Dalam bab *The Purchase of Slaves*, ia menyarankan agar tuan memperlakukan budak dengan baik, bukan hanya karena belas kasihan, tetapi juga demi efisiensi sosial dan citra diri. *"Do not give the slave work beyond his ability... treat him kindly, so that he may serve you willingly and loyally."* (Ka'us, 1951)

Nasihat-nasihat ini menunjukkan nilai-nilai humanistik dalam batasan sistem sosial feodal saat itu. Perlakuan baik bukan semata-mata karena kesadaran hak asasi, tetapi karena pemahaman bahwa ketertiban dan kehormatan bangsawan tergantung pada bagaimana ia mengelola relasi sosial di sekitarnya.

2. Nizam Al-Mulk: Moralitas sebagai Tanggung Jawab Ilahiah dan Etika Kekuasaan

Berbeda dari Kai Kaus, Nizam Al-Mulk memandang moralitas sebagai suatu sistem nilai yang mengikat secara teologis dan politis. Dalam *Siyasatnama*, seorang pemimpin wajib menegakkan keadilan, menumpas kezaliman, dan menjaga moralitas publik. Ia tidak boleh bertindak semena-mena, dan segala keputusan harus berada dalam kerangka *sharī'ah* dan tanggung jawab kepada Tuhan. *"The king must listen to the complaints of his people without intermediary... if he neglects this, oppression will grow and the state will fall."* (Al-Mulk, 1960)

Nizam Al-Mulk memandang keadilan bukan hanya sebagai nilai moral, tetapi sebagai syarat keberlangsungan negara. Ia bahkan menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada agama itu sendiri dalam konteks ketahanan negara (Fuad, 2018). Moralitas dalam pandangan Nizam bersifat sistemik dan kolektif. Tidak cukup jika hanya pemimpin yang bermoral; seluruh aparat negara (*wazīr*, *qādī*, kolektor pajak, tentara, mata-mata) juga harus menjalankan fungsi etis mereka demi menjaga stabilitas dan kemakmuran umat.

Pengaruh Konteks Budaya

Dalam memahami gagasan kepemimpinan dan moralitas dari Kai Kaus dan Nizam Al-Mulk, tidak cukup jika kita hanya membaca isi teks secara literal. Perlu ditelusuri pula bagaimana konteks budaya baik dari segi nilai, sistem sosial, maupun struktur kekuasaan membentuk cara mereka menafsirkan dan menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Kedua karya ditulis di wilayah Persia abad ke-11, namun latar sosial dan politik masing-masing penulis sangat berbeda, sehingga melahirkan corak yang kontras dalam merumuskan peran pemimpin dan etika kekuasaan.

1. Budaya Aristokratik dalam *Qabus Nama*

Kai Kaus menulis *Qabus Nama* dalam situasi di mana struktur kekuasaan lokal di Persia sedang mengalami perubahan. Ia adalah bangsawan dari dinasti Ziyarid yang menurun kekuasaannya dan tidak lagi memainkan peran besar dalam skala geopolitik. Dalam konteks ini, Kai Kaus menulis sebagai seorang ayah, bukan sebagai penguasa aktif. Karena itu, fokus utama bukunya adalah pewarisan nilai-nilai moral dan kebangsawanan, bukan kebijakan publik atau ketatanegaraan (Ka'us, 1951).



Budaya aristokratik yang memengaruhi *Qabus Nama* tercermin dalam banyak aspek. Pertama, cara Kai Kaus mengajarkan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh konsep kehormatan pribadi dan reputasi keluarga. Ia kerap menekankan pentingnya menjaga nama baik, memperlakukan budak dengan sopan namun tegas, memilih teman dengan bijak, serta menghindari pertikaian yang merendahkan martabat. Misalnya, dalam bab *The Purchase of Slaves*, ia tidak hanya memberikan kriteria pemilihan budak secara fisik, tetapi juga psikologis dan moral (Ka'us, 1951): "*Choose one who is sweet-natured and good-humoured, for if he is obedient, he will bring you ease, but if he is sullen and rebellious, he will give you nothing but trouble.*"

Kedua, Kai Kaus lebih menekankan pengalaman hidup dan kebijaksanaan praktis sebagai sumber pengetahuan moral. Ia tidak mengutip ayat atau hadis, tetapi justru memanfaatkan anekdot, pepatah, dan pengalaman pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Persia pasca-Islamisasi masih mempertahankan semangat Zoroastrianisme, yaitu menekankan akal sehat, kehormatan keluarga, dan etos kerja sebagai pilar etika.

2. Budaya Birokratik dan Islam Ortodoks dalam *Siyasatnama*

Siyasatnama lahir dari jantung kekuasaan dinasti Saljuk, di mana Nizam Al- Mulk menjabat sebagai wazīr selama hampir tiga dekade. Ia bukan hanya seorang administrator, tetapi juga teoretisi negara. Oleh karena itu, *Siyasatnama* sangat dipengaruhi oleh budaya birokratik dan pandangan dunia Islam ortodoks (Fuad, 2018). Dalam budaya birokratik Saljuk, kekuasaan tidak hanya berada di tangan sultan, tetapi juga dijalankan melalui jaringan pejabat, administrator, qādī, petugas pajak, tentara, dan agen mata-mata. Nizam merumuskan moralitas sebagai bagian dari sistem kontrol negara. Ia menulis bahwa penguasa yang baik harus bersikap adil, mendengarkan langsung keluhan rakyat, memecat pejabat korup, dan bahkan menyebar mata-mata untuk memastikan semua wilayah berada dalam kendali (Al- Mulk, 1960): "*The king must receive reports directly from his spies... only then will he know what takes place in his realm.*"

Budaya Islam ortodoks dalam *Siyasatnama* juga sangat menonjol. Nizam secara eksplisit menghubungkan otoritas raja dengan kehendak Tuhan. Moralitas tidak lagi sekadar masalah etika pribadi, melainkan tanggung jawab teologis. Setiap penyimpangan dari prinsip keadilan dipandang sebagai ancaman terhadap legitimasi negara. Ia menulis (Al-Mulk, 1960): "*Religion and government are like two brothers... if one is harmed, the other cannot survive.*"

Selain itu, *Siyasatnama* juga merefleksikan ketegangan antara warisan budaya Persia kuno dan ortodoksi Islam. Nizam, meskipun Sunni taat dan loyal terhadap shari'ah, tetap mengadopsi struktur pemerintahan Persia pra-Islam seperti sistem wazīr, sistem pajak, dan hirarki pejabat sipil. Dengan kata lain, moralitas negara dalam *Siyasatnama* adalah hasil dari sintesis: doktrin agama Islam menyatu dengan rasionalitas politik dan pengalaman administratif dari warisan Persia klasik.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Kai Kaus dalam *The Purchase of Slaves* dan Nizam Al-Mulk dalam *Advice to Governors* sama-sama menekankan pentingnya moralitas dalam kepemimpinan, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kai Kaus melihat kepemimpinan sebagai tanggung jawab pribadi yang harus dijalankan dengan bijaksana dan penuh pertimbangan etika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam relasi interpersonal seperti antara tuan dan budak. Sementara itu, Nizam Al-Mulk memandang kepemimpinan sebagai amanah besar dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dalam ruang lingkup pemerintahan dan birokrasi negara.



Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan posisi keduanya dalam masyarakat. Kai Kaus adalah seorang bangsawan yang menulis untuk anaknya, sedangkan Nizam Al-Mulk adalah seorang wazir besar dalam pemerintahan. Walaupun demikian, keduanya sepakat bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap dampaknya bagi masyarakat luas. Dengan demikian, kedua karya ini masih relevan dijadikan bahan refleksi dalam memahami kepemimpinan di masa kini.

REFERENCES

- Al-Mulk, Nizam. (1960). The book of government or rules for kings: The Siyar al Muluk or Siyasat-nama of Nizam al-Mulk. In Hubert Darke (Trans.), The Book of Government or Rules for Kings: The Siyar al Muluk or Siyasat-nama of Nizam al-Mulk. <https://doi.org/10.4324/9780203358399>
- Aziera, Intan Nor. (2020). Analisis Advice Government Karya Nizam Al-Mulk dan The Purchase Of Slaves Karya Kai Kaus. 1(May), 1-77. Retrieved from www.rand.org/randeurope%0Ahttp://ezproxy.library.dal.ca/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=129592973&site=ehost-live%0Ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=2010154866&site=ehost-live%5Cnhttp://rep
- Fuad, Ahmad Nur. (2018). Nizam Al-Mulk dan Kontribusinya Terhadap Pemikiran Politik Islam. *Islamica: Studi Keislaman*, 13(1), 91-102.
- Ka'us, Kai. (1951). *Qabus Nama: A Mirror for Princes* (Reuben Levy, trans.). New York: E.P.Dutton & CO.INC.
- Pratama, Rakha, & Hidayatullah, Rahmat. (2023). Filsafat Politik NizamAl-Mulk Dalam Buku The Book of Government or Rules For Kings. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 2(1), 1-14. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>